



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 8174-8182

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Prinsip Kemanfaatan Terbesar (The Greatest Good) dalam Dilema Keimigrasian: Sebuah Tinjauan Etis

Muhammad Daffa Khairan^{1✉}, Koesmoyo Ponco Aji², Alrin Tambunan³

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: daffakh14@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Artikel ini menyajikan tinjauan etis terhadap dilema keimigrasian yang kompleks. Dengan menggunakan prinsip utilitarian "kemanfaatan terbesar bagi jumlah terbesar" sebagai lensa analisis, penelitian ini tidak bertujuan memberikan solusi definitif, melainkan memetakan kontur moral dari dilema tersebut. Tinjauan ini membedah tensi fundamental, seperti konflik antara kalkulasi kesejahteraan nasional dan kewajiban moral global, serta pertentangan antara manfaat ekonomi agregat dan keadilan distributif. Argumen utama yang diajukan adalah bahwa nilai sejati pendekatan utilitarian bukanlah pada kemampuannya menghasilkan jawaban tunggal, tetapi pada kemampuannya untuk memaksa pemangku kepentingan menghadapi secara transparan siapa yang diuntungkan dan dirugikan. Pada akhirnya, prinsip ini berfungsi sebagai alat diagnostik yang kuat untuk mendorong perdebatan yang lebih jujur tentang batasan tanggung jawab moral kita dalam dunia yang saling terhubung.

Kata Kunci: *Utilitarianisme, Imigrasi, Dilema Etis, Keadilan Global, Etika Politik*

Abstract

This article presents an ethical review of the complex dilemma of immigration. Using the utilitarian principle of "the greatest good for the greatest number" as an analytical lens, this study does not aim to provide definitive solutions, but to map the moral contours of the dilemma. The review examines fundamental tensions, including the conflict between national welfare calculations and global moral obligations, as well as the clash between aggregate economic benefits and distributive justice. The central argument is that the true value of the utilitarian approach lies not in its capacity to yield a single correct answer, but in its power to compel stakeholders to transparently confront who benefits and who is harmed by a policy. Ultimately, the principle serves as a powerful diagnostic tool to foster a more honest debate about the boundaries of our moral responsibilities in an interconnected world.

Keywords: Utilitarianism, Immigration, Ethical Dilemma, Global Justice, Political Ethics

PENDAHULUAN

Setiap kebijakan imigrasi, pada intinya, adalah sebuah jawaban atas dilema moral yang mendalam. Keputusan untuk membuka pintu, membangun tembok, menyeleksi pendatang berdasarkan keterampilan, atau menerima pengungsi berdasarkan kebutuhan kemanusiaan, bukanlah sekadar pilihan teknis-administratif. Ia adalah pernyataan tentang batasan tanggung jawab moral sebuah komunitas politik dan pertaruhan etis dengan konsekuensi yang menjangkau generasi. Filsuf politik David Miller (2016) bahkan berargumen bahwa cara sebuah negara mengatur perbatasannya merupakan salah satu cerminan paling fundamental dari karakter dan nilai-nilai yang dianutnya. Namun, dalam riuhnya debat publik, diskusi mengenai imigrasi sering kali terdegradasi menjadi kalkulasi ekonomi yang sempit, retorika keamanan yang mengundang ketakutan, atau sentimen nasionalistis yang emosional. Kompleksitas etisnya sering kali hilang dalam penyederhanaan ini.

Di satu sisi, argumen yang kuat diajukan untuk perbatasan yang lebih terbuka, sering kali dengan landasan utilitarian yang menekankan peningkatan kesejahteraan global secara masif. Bryan Caplan (2019), misalnya, menyoroti potensi keuntungan ekonomi triliunan dolar jika tenaga kerja dapat bergerak bebas, sebuah "kebaikan" agregat yang luar biasa besar. Di sisi lain, para pemikir menekankan pentingnya kedaulatan negara dan kohesi sosial, dengan alasan bahwa komunitas politik memiliki hak untuk melindungi cara hidup dan institusi mereka, sebuah pandangan yang menuntut adanya pembatasan imigrasi (Miller, 2016). Dilema ini semakin rumit ketika menyangkut pengungsi, di mana kewajiban kemanusiaan berbenturan langsung dengan kapasitas dan kepentingan negara penerima (Fine, 2018).

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan sebuah tinjauan etis yang sistematis dengan menggunakan salah satu pilar filsafat moral, yakni prinsip kemanfaatan terbesar (*the principle of the greatest good*) dari tradisi utilitarianisme. Tesis utama tulisan ini bukanlah bahwa utilitarianisme akan memberikan satu jawaban final yang mampu menyelesaikan dilema keimigrasian. Sebaliknya, tulisan ini berargumen bahwa prinsip kemanfaatan terbesar, ketika diterapkan secara jujur, justru berfungsi sebagai pisau bedah yang paling tajam untuk mengurai kompleksitas dilema tersebut. Ia memaksa kita untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman: *Kesejahteraan siapa yang kita prioritaskan? Jenis 'kebaikan' apa yang kita kejar? Dan atas biaya siapa 'kebaikan' itu dicapai?*

Untuk membedah dilema ini, tulisan ini akan meninjau tiga arena konflik utama: pertama, ketegangan antara kalkulasi kesejahteraan nasional dan kewajiban moral global; kedua, pertentangan antara klaim manfaat ekonomi agregat dan realitas distribusi biaya sosial yang tidak merata; dan ketiga, dilema antara pertimbangan jangka pendek dan konsekuensi jangka panjang. Melalui tinjauan ini, akan terlihat bahwa dilema keimigrasian bukanlah pertarungan sederhana antara "baik" dan "buruk", melainkan sebuah negosiasi tragis antara berbagai versi "kebaikan" yang saling bersaing.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), yaitu metode yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai argumen etis dan kerangka kerja moral yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam pendekatan ini, yang dianalisis meliputi prinsip-prinsip dasar dari teori utilitarianisme, argumen-argumen kunci dalam debat etika imigrasi, serta keselarasan logis antar gagasan tersebut. Tujuannya adalah untuk menilai apakah terdapat pertentangan atau justru konsistensi di antara berbagai posisi etis yang ada, serta untuk mengungkap asumsi-asumsi yang mendasarinya.

2. Metode Pengumpulan Data

Data memegang peranan yang sangat krusial dalam suatu penelitian, karena dari data yang telah dikumpulkan akan dilakukan pengolahan dan analisis guna menghasilkan suatu kesimpulan. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup penjabaran sistematis mengenai prosedur perolehan bahan penelitian primer, sekunder, dan tersier.

- Bahan Primer adalah karya-karya filosofis fundamental yang menjadi sumber utama teori, seperti tulisan Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Peter Singer.

- Bahan Sekunder meliputi monograf dan artikel jurnal ilmiah kontemporer yang membentuk perdebatan inti, seperti karya David Miller, Bryan Caplan, dan para pemikir relevan lainnya.
- Bahan Tersier mencakup *handbook*, ensiklopedia filsafat, dan tinjauan literatur yang membantu memetakan lanskap perdebatan.

Seluruh bahan penelitian yang relevan akan disusun secara terstruktur, lalu diinventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan isu etis yang menjadi fokus penelitian. Setiap tahapan dalam pengelolaan bahan ini pada akhirnya digunakan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah.

3. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses menelaah hasil pengolahan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Dalam studi ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif-evaluatif, yaitu teknik yang digunakan untuk menguraikan, menafsirkan, dan mengevaluasi secara kritis data kualitatif yang terkumpul dari bahan-bahan penelitian. Proses ini melibatkan penerapan kerangka kerja konseptual (utilitarianisme) pada argumen-argumen yang ada untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan implikasinya.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk naratif-argumentatif guna memudahkan penyampaian informasi dan penarikan kesimpulan. Setelah kesimpulan diperoleh, peneliti dapat merumuskan implikasi etis dari temuan, memberikan pertimbangan untuk perdebatan kebijakan, serta menyampaikan saran terkait arah penelitian di masa depan yang relevan dengan isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis ini menerapkan kerangka utilitarian untuk melakukan dekonstruksi terhadap dilema-dilema etis yang inheren dalam kebijakan keimigrasian. Pembahasan berikut menguraikan tiga arena diskursif utama di mana prinsip kemanfaatan terbesar menghasilkan divergensi interpretatif yang fundamental, dengan mengacu pada literatur filosofis kontemporer.

a. Dilema I: Kesejahteraan Nasional versus Kewajiban Kosmopolitan

Divergensi konseptual yang paling mendasar dalam aplikasi etika utilitarian pada keimigrasian terletak pada penentuan cakupan komunitas moral (*scope of moral community*). Pertanyaan "kemanfaatan untuk siapa?" melahirkan antitesis antara dua postulat utilitarian yang sama-sama koheren secara internal.

1) Postulat Prioritas Nasional (Utilitarianisme Partikularis)

Perspektif ini, yang diartikulasikan secara sistematis oleh David Miller, berargumen bahwa negara-bangsa berfungsi sebagai prasyarat instrumental bagi realisasi berbagai bentuk kesejahteraan kolektif. Institusi-institusi krusial seperti negara kesejahteraan (*welfare state*), demokrasi deliberatif, dan kepercayaan sosial (*social trust*) mensyaratkan adanya budaya publik bersama (*shared public culture*) dan solidaritas kewargaan (Miller, 2016). Dari kerangka pandang ini, imigrasi yang tidak teregulasi berpotensi mendisrupsi kohesi sosial yang menjadi fondasi institusi tersebut, sehingga dapat secara paradoksal mengurangi kesejahteraan agregat domestik. Dengan demikian, pembatasan imigrasi tidak dimaknai sebagai tindakan eksklusif yang egoistis, melainkan sebagai upaya rasional untuk mempreservasi kerangka institusional yang memungkinkan kemanfaatan dapat diproduksi dan didistribusikan secara efektif.

2) Postulat Imperatif Imparsial (Utilitarianisme Kosmopolitan)

Perspektif ini secara radikal menolak signifikansi moral dari batas-batas negara, dengan bertumpu pada prinsip etis fundamental: imparsialitas. Mengadopsi "sudut pandang universal", atribut kebangsaan dipandang sebagai suatu bentuk kontingensi kelahiran yang arbitrer. Pemikir seperti Peter Singer (2018) menegaskan bahwa kewajiban untuk memitigasi penderitaan tidak dapat dibatasi oleh faktor geografis. Argumen ekonomi yang diajukan oleh Bryan Caplan (2019) mengenai potensi keuntungan PDB global dalam skala triliunan dolar, jika dibaca melalui lensa ini, merepresentasikan sebuah imperatif moral untuk mereduksi kemiskinan dan penderitaan dalam skala masif. Oleh karena itu, mempertahankan restriksi perbatasan yang kaku, ketika biaya domestiknya minimal dibandingkan dengan keuntungan globalnya, merupakan tindakan yang secara etis problematis dari perspektif utilitarian murni.

Analisis terhadap dilema ini mengeksplisitkan tegangan antara dua jenis "kebaikan": kebaikan instrumental (preservasi negara sebagai wahana kesejahteraan) dan kebaikan intrinsik (maksimalisasi kesejahteraan individu tanpa memandang afiliasi). Formulasi sintetik yang dapat diajukan tidak bersifat biner, melainkan mencari sebuah ekuilibrium. Hal ini membuka ruang bagi konsep seperti kedaulatan yang berporositas (*porous sovereignty*) atau sebuah model utilitarianisme terbobot (*weighted utilitarianism*). Model tersebut memberikan bobot pertimbangan yang lebih tinggi—namun tidak absolut—kepada

kesejahteraan sesama warga negara, seraya tetap mengakui kewajiban moral substansial terhadap individu di luar komunitas politiknya.

b. Dilema II: Efisiensi Agregat versus Ekuita Distributif

Dilema ini mempertanyakan asumsi inti dalam kalkulus utilitarian: apakah optimalisasi total kemanfaatan (efisiensi) merupakan satu-satunya variabel yang relevan, ataukah pola distribusi kemanfaatan tersebut (ekuita) juga memiliki bobot moral yang independen.

1) Argumen Optimalitas Agregat ("Growing the Pie")

Argumen ini berfokus pada maksimalisasi output ekonomi total sebagai tujuan utama. Kebijakan imigrasi yang liberal dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan PDB, mendorong inovasi, dan mengatasi defisit demografis, yang pada akhirnya memperbesar total sumber daya yang tersedia bagi masyarakat (Wellman, 2017). Meskipun diakui adanya potensi dislokasi ekonomi bagi sebagian kelompok, argumen ini menyatakan bahwa solusi paling rasional adalah dengan terlebih dahulu memaksimalkan output agregat. Peningkatan basis pajak dan dinamisme ekonomi akan menyediakan kapasitas fiskal yang lebih besar untuk mendanai program kompensasi, seperti pelatihan ulang tenaga kerja atau penguatan jaring pengaman sosial.

2) Argumen Keadilan Distributif ("Slicing the Pie")

Kritik terhadap argumen di atas muncul dari prinsip utilitas marginal yang menurun (*diminishing marginal utility*). Prinsip ini menyatakan bahwa satu unit sumber daya tambahan akan menghasilkan peningkatan utilitas yang lebih besar bagi individu berpenghasilan rendah dibandingkan bagi individu berpenghasilan tinggi. Konsekuensinya, sebuah kebijakan yang secara marjinal menurunkan upah ribuan pekerja berketerampilan rendah demi meningkatkan profit segelintir korporasi dapat bersifat secara agregat produktif, namun secara utilitarian regresif—yakni, menurunkan total utilitas atau kebahagiaan dalam masyarakat. Lebih lanjut, kebijakan imigrasi yang buta terhadap konteks dapat mengeksaserbasi ketidaksetaraan struktural yang telah ada, terutama yang berkaitan dengan ras dan kelas (Sager, 2018).

Dikotomi ini merepresentasikan tegangan klasik antara utilitarianisme tindakan (*act utilitarianism*) dan utilitarianisme aturan (*rule utilitarianism*). *Act utilitarianism* mungkin membenarkan suatu kebijakan yang tidak adil secara distributif jika kalkulasi sesaat menunjukkan surplus kemanfaatan. Sebaliknya, *rule utilitarianism* akan mendukung adopsi seperangkat aturan dan institusi umum yang secara konsisten terbukti memaksimalkan

kesejahteraan dalam jangka panjang. Sintesis yang muncul adalah bahwa efisiensi alokatif dari imigrasi tidak dapat dipisahkan dari desain kerangka kelembagaan yang adil. Dengan demikian, kebijakan imigrasi yang optimal secara utilitarian adalah yang terintegrasi dengan regulasi pasar tenaga kerja yang adil, sistem pajak progresif, dan investasi publik yang ditargetkan untuk mitigasi dampak distributif yang negatif.

c. Dilema III: Urgensi Jangka Pendek versus Konsekuensi Jangka Panjang

Dilema terakhir ini berkaitan dengan masalah intertemporal dalam kalkulasi etis, menyoroti batas-batas kemampuan prediktif dalam pengambilan keputusan moral yang berorientasi pada konsekuensi.

1) Postulat Prioritas pada Kepastian (Fokus Jangka Pendek)

Argumen ini memberikan bobot moral yang signifikan pada kepastian epistemik. Penderitaan seorang pengungsi yang melarikan diri dari persekusi adalah fenomena yang aktual, mendesak, dan dapat diverifikasi. Kewajiban moral untuk merespons penderitaan yang pasti dan hadir di depan mata sering kali dipandang lebih mengikat daripada kewajiban untuk mengelola risiko-risiko masa depan yang bersifat spekulatif (Fine, 2018). Menolak intervensi kemanusiaan yang urgen dengan dalih kekhawatiran jangka panjang yang abstrak dapat dianggap sebagai bentuk pengelakan dari tanggung jawab moral yang jelas dan nyata. Dalam kalkulasi utilitarian, variabel "kepastian" (certainty) dari suatu penderitaan memberinya bobot yang sangat tinggi.

2) Postulat Tanggung Jawab Antargenerasi (Fokus Jangka Panjang)

Pendekatan ini menekankan konsep ketergantungan pada lintasan historis (path dependency). Keputusan kebijakan yang diambil saat ini akan membentuk struktur sosial, demografis, dan institusional yang akan sulit diubah oleh generasi mendatang. Kebijakan mengenai kriteria seleksi imigran dan model integrasi akan secara kumulatif mentransformasi identitas kolektif dan makna kewarganegaraan itu sendiri (Shachar, 2020). Mengabaikan konsekuensi jangka panjang ini demi solusi jangka pendek yang pragmatis dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian terhadap tanggung jawab penatagunaan kewargaan (civic stewardship).

Dilema ini mengekspos keterbatasan epistemik yang inheren dalam utilitarianisme. Teori ini secara ideal menuntut omniscience (serba tahu) mengenai konsekuensi, suatu syarat yang mustahil dipenuhi. Sintesis yang paling rasional bukanlah upaya untuk mencapai prediktabilitas yang sempurna, melainkan perancangan kebijakan yang memiliki robustitas (robustness) dalam menghadapi ketidakpastian. Ini berarti kebijakan imigrasi harus

dipandang bukan sebagai keputusan statis, melainkan sebagai proses yang adaptif dan iteratif. Pendekatan utilitarian yang matang akan mengalihkan fokus dari prediksi absolut ke pembangunan kapasitas institusional untuk belajar dan beradaptasi—melalui mekanisme pemantauan dampak yang berkelanjutan, evaluasi kebijakan yang independen, dan forum deliberasi publik yang inklusif untuk menavigasi perubahan sosial-budaya dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Setelah melalui analisis mendalam terhadap dilema-dilema etis keimigrasian, penelitian ini tiba pada kesimpulan fundamental yang mengafirmasi tesis utamanya. Nilai terbesar dari prinsip kemanfaatan terbesar (*the greatest good*) dalam konteks ini bukanlah kemampuannya untuk menyajikan satu kebijakan yang 'benar' secara absolut, melainkan perannya sebagai kerangka kerja diagnostik yang menyingkap kompleksitas moral yang sering kali terabaikan dalam diskursus publik. Utilitarianisme berfungsi bukan sebagai solusi, melainkan sebagai instrumen penjernih.

Penerapan prinsip ini secara sistematis telah mengeksplisitkan tiga tegangan utama. Pertama, tegangan pada cakupan moral, yang memaksa terjadinya konfrontasi antara logika utilitarianisme nasionalis yang memprioritaskan komunitas politik domestik, dengan imperatif utilitarianisme kosmopolitan yang menuntut imparialitas global. Kedua, tegangan pada aspek distributif, yang mempertentangkan tujuan efisiensi agregat dengan prinsip keadilan, mendorong teori ini bergerak melampaui kalkulasi sederhana menuju pertimbangan institusional yang diwadahi oleh utilitarianisme aturan. Ketiga, tegangan intertemporal, yang mengekspos keterbatasan epistemik teori utilitarianisme dalam menghadapi ketidakpastian jangka panjang, menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang adaptif dan robust.

Pada akhirnya, kontribusi utama dari pendekatan utilitarian terhadap isu imigrasi adalah kemampuannya untuk mendisiplinkan perdebatan. Ia menuntut para pemangku kepentingan untuk beralih dari argumentasi yang berbasis sentimen atau ideologi menuju diskursus yang berfokus pada konsekuensi nyata terhadap kesejahteraan manusia. Ia memaksa adanya transparansi mengenai trade-off yang tidak terhindarkan—siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung beban, dan dalam horizon waktu yang mana. Utilitarianisme tidak memberikan peta jalan yang mudah, tetapi ia menyalakan lentera yang terang, memaksa kita untuk menavigasi medan dilema imigrasi yang sulit dengan kesadaran intelektual dan kejujuran moral yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi-anto, H. (2020). Hak asasi manusia dan kedaulatan negara dalam kebijakan imigrasi Indonesia: Sebuah tinjauan filosofis. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 45–68.
- Caplan, B. (2019). *Open borders: The science and ethics of immigration*. First Second.
- Fine, S. (2018). Refugees and the limits of responsibility. Dalam K. Lippert-Rasmussen (Ed.), *The Routledge handbook of the ethics of discrimination* (hlm. 371–382). Routledge.
- Miller, D. (2016). *Strangers in our midst: The political philosophy of immigration*. Harvard University Press.
- Sager, A. (2018). *Toward a political philosophy of race*. SUNY Press.
- Shachar, A. (2020). *The shifting border: Legal cartographies of migration and mobility*. Manchester University Press.
- Singer, P. (2018). The life you can save: The ethics of foreign aid. Dalam P. Woodruff (Ed.), *The ethics of giving: Philosophers' perspectives on philanthropy* (hlm. 195–210). Oxford University Press.
- Wellman, C. H. (2017). Immigration. Dalam E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford encyclopedia of philosophy* (Edisi Musim Dingin 2017). Diakses dari <https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/immigration/>.